

**INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2020**

PROVINSI : Nusa Tenggara Timur
NAMA SKPD : Dinas Kelautan Dan Perikanan NTT
URUSAN YANG DILAKSANAKAN : Kelautan Dan Perikanan

NO	URUSAN Pemerintahan	NO	IKK OUTCOME	RUMUS	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Kelautan & perikanan	1	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) dari seluruh Kabupaten/ Kota di wilayah Provinsi (Sumber data: one data KKP)	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) dari seluruh Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi 1. Produksi Tangkap (Ton) 2. Produksi Budidaya (Ton)	1. 172.520 ton 2. 2.010.895,23 ton	One Data KKP	(Data Terlampir)
		2	Persentase kepatuhan pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	$X = \sum_{i=1}^{106} \left\{ \frac{10}{10 \cdot 100\%} \right\}$ $= 100\%$ Keterangan: x: Persentase kepatuhan pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku c_i: jumlah pelaku usaha KP yang patuh s_i: jumlah sampel pelaku usaha KP yang diperiksa i: jenis komponen pelaku usaha KP n: jumlah komponen pelaku usaha KP	100 %	Bidang P3KP	Dimana : i = 1 n = 106 ci = 10 si = 10

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi Nusa Tenggara Timur,

Ganef Wurgiyanto, A.Pi
Pembina Utama Muda
NIP. 19631010 198903 1 030

**INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2020**

PROVINSI : Nusa Tenggara Timur
NAMA SKPD : Dinas Kelautan Dan Perikanan NTT
URUSAN YANG DILAKSANAKAN : Kelautan & Perikanan

	Urusan Pemerintahan	NO	IKK OUTPUT	RUMUS	Capaian Kinerja	Sumber Data	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Kelautan & Perikanan	1	Jumlah Laut pedalaman territorial dan perairan kepulauan yang dikelola sumber daya ikannya (WPP)	Jumlah WPP yang telah melaksanakan upaya pengelolaan di laut pedalaman, territorial dan perairan kepulauan	- WPP-NRI 573 = 22 Kabupaten/kota - WPP-NRI 713 = 8 Kabupaten - WPP-NRI 714 = 3 Kabupaten	Bidang PSDKP	-WPP-NRI 573 (Kota Kupang, Kab. Kupang, TTS, TTU, Belu, Malaka, Alor, Lembata, Flores Timur, Sikka, Ende, Nagekeo, Ngada, Manggarai Timur, Manggarai, Manggarai Barat, Sumba Timur, Sumba Barat, Sumba Tengah, Sumba Barat Daya, Sabu Raijua dan Rote Ndao) - WPP-NRI 713 (Flores Timur, Sikka, Ende, Nagekeo, Ngada, Manggarai Timur, Manggarai dan Manggarai Barat) - WPP-NRI 714 (Alor, Lembata dan Flores Timur) *PERMEN KP NO. 18 THN. 2014 (Data Terlampir)
		2	Jumlah izin usaha perikanan tangkap untuk kapal perikanan berukuran 5 – 30 GT	Jumlah izin usaha perikanan tangkap untuk kapal perikanan berukuran di atas 5 GT sampai dengan 30 GT yang diterbitkan Provinsi pertahun	- 851 izin	Bidang Perikanan Tangkap	Izin yang dikeluarkan DKP antara lain sbb: - BPKP Andon 20 Ijin (sampai dengan 10 GT) - SIPI Andon 250 Ijin (di atas 10 GT) - SIKPI 10-30 GT sebanyak 18 Rekomendasi - STKA (Surat Tanda Keterangan Andon) diatas 10 GT sebanyak 12 - SIPI di atas 10 GT – 30 GT sebanyak 467 rekomendasi - SIUP 84 Rekomendasi (Data Terlampir)
		3	Persentase Pelabuhan Perikanan yang memiliki Standar Operasional	$\frac{\text{Jumlah Pelabuhan Perikanan yang Memenuhi Minimal 3 (tiga) Standar Operasional}}{\text{Jumlah Seluruh Pelabuhan Perikanan}} \times 100$	$\frac{2}{19} \times 100$ $= 10,53$	Bidang Perikanan Tangkap	-Pelabuhan Perikanan yang Memenuhi Minimal 3 (tiga) Standar Operasional: a. PPP Tenau (Kota Kupang) b. PPI Oeba (Kota Kupang) -Sumber Pelabuhan ada di KEPMEN KP NO 6 THN. 2018 (Data Terlampir)

	Urusan Pemerintahan	NO	IKK OUTPUT	RUMUS	Capaian Kinerja	Sumber Data	KET.
		4	Jumlah izin pembangunan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan dengan ukuran di atas 5 – 30 GT	Jumlah Izin pembangunan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan dengan ukuran di atas 5 GT s/d 30 GT dalam 1 Tahun	Tidak Ada	Tidak Ada	Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2020 tidak ada kegiatan perizinan untuk pembangunan kapal berukuran 5-30 GT
		5	Jumlah Kapal yang terdaftar	Jumlah kapal perikanan yang terdaftar di atas 5 GT s/d 30 GT dalam satu tahun	1.900 Kapal	BIDANG TANGKAP	(Data Terlampir)
		6	Jumlah izin usaha perikanan di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 provinsi yang diterbitkan	Jumlah izin usaha perikanan dibidang pembudidayaan ikan yang usahanya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi yang diterbitkan per tahun	Tidak ada	Tidak Ada	Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2020 tidak ada kegiatan perizinan untuk usaha pembudidayaan ikan
		7	Persentasi luas wilayah laut dan pesisir yang dikelola sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku	$\frac{\text{luas wilayah laut \& pesisir yang dikelola sesuai dengan Peraturan perundangan yang berlaku}}{\text{Luas wilayah laut \& pesisir yang dimiliki}} \times 100$	$\frac{3.398.428,75}{20.000.000} \times 100$ = 16,99 %	BIDANG PRLPB	Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Nusa Tenggara Timur 2017-2037 (Data Terlampir)
		8	Jumlah Kawasan Konservasi perairan atau kawasan konservasi pesisir pada pulau-pulau kecil yang dikelola	$\frac{\text{Jumlah Kawasan Konservasi perairan atau kawasan konservasi pesisir \& pulau-pulau kecil yang dikelola secara efektif}}{\text{Keseluruhan kawasan konservasi perairan yang dimiliki}} \times 100$	$\frac{1}{4} \times 100$ = 25 %	BIDANG PRLPB	SAP Alor (Terlampir Kepmen Nomor 35/Kepmen-Kp/2015 Tentang Kawasan Konservasi Perairan Selat Pantar Dan Laut Sekitarnya Di Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur)
		9	Jumlah unit kapal perikanan perikanan (10-30GT) yang diperiksa kepatuhannya terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	Jumlah unit kapal perikanan perikanan (10-30GT) yang diperiksa kepatuhannya terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	36 UNIT	BIDANG PSDKP	Tanpa kelengkapan dokumen dan sudah habis masa berlaku ijinnya (Terlampir Pelaksanaan Operasi Kepatuhan)
		10	Jumlah pembudidaya ikan yang mempunyai Izin Usaha Perikanan (IUP) provinsi dan Kab/Kota yang diperiksa kepatuhannya terhadap ketentuan peraturan perundangan	Jumlah pembudidaya ikan yang mempunyai Izin Usaha Perikanan (IUP) provinsi dan Kab/Kota yang diperiksa kepatuhannya	Tidak Ada	Tidak Ada	Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2020 tidak ada kegiatan perizinan untuk usaha pembudidayaan ikan
		11	Jumlah unit usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan provinsi yang mempunyai izin usaha perikanan provinsi yang diperiksa kepatuhannya	Jumlah unit usaha dan pengolahan hasil perikanan provinsi yang mempunyai izin usaha perikanan provinsi yang diperiksa kepatuhannya (<i>compliance</i>) terhadap peraturan perundangan yang berlaku	106 izin: UPI = 43 unit UKM = 63 unit UPI (Unit Pengolahan Ikan) UKM (Usaha Kecil Menengah)	BIDANG P3KP	(Data Terlampir)

	Urusan Pemerintahan	NO	IKK OUTPUT	RUMUS	Capaian Kinerja	Sumber Data	KET.
			(<i>compliance</i>) terhadap peraturan perundangan yang berlaku				
		12	Jumlah pemegang izin pemanfaatan ruang laut di bawah 12 mil laut (di luar minyak dan gas bumi) yang diperiksa kepatuhannya (<i>compliance</i>) terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	Jumlah pemegang izin pemanfaatan ruang laut di bawah 12 mil laut (diluar minyak gas dan bumi) yang diperiksa kepatuhannya (<i>compliance</i>) terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	10 Rekomendasi	BIDANG PRLPB	(Data Terlampir)
		13	Jumlah POKMASWAS yang aktif dalam mendukung pengawasan SDKP	Jumlah POKMASWAS yang aktif dalam mendukung pengawasan SDKP	62 POKMASWAS	PSDKP	(Data terlampir)
		14	Jumlah izin usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan lintas daerah Kab/Kota dalam 1 daerah provinsi yang diterbitkan	Jumlah izin usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan lintas daerah Kab/Kota dalam 1 daerah provinsi yang diterbitkan	115 Rekomendasi : 1. 87 SIUP 2. 28 SKP	BIDANG P3KP	(Data terlampir)

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Ganef Wurgiyanto, A.Pi,
Pembina Utama Muda
NIP. 19631010 198903 1 030